DIPLOMASI DI BAWAH KOLONIALISME: PETISI SUTARDJO, FRAKSI NASIONAL, DAN GAPI SEBAGAI STRATEGI PERJUANGAN KOOPERATIF BANGSA INDONESIA (1936–1942)

Fitri Andayani[1], Syren Salsabilah[2], Laylatul Hasanah[3], M. Fharel Rafer Perdana[4], Rosannita[5], Etmi Hardi[6]

[1,2,3,4,5,6]*Universitas Negeri Padang*

E-mail : andayanifitriandayani369@gmail.com[1], syrensalsabilahdlt@gmail.com[2], laylahasanah01012006@gmail.com[3], fharelrafer@gmail.com[4], rosannita00@gmail.com[5], etmihardi@fis.unp.ac.id[6]

ABSTRACT

The national movement of Indonesia in the period 1927–1942 underwent significant strategic transformations, shifting from radical and non-cooperative approaches toward more moderate and cooperative forms of political struggle. This study aims to analyze three major forms of cooperative political struggle: the Sutardjo Petition of 1936, the National Fraction (Fraksi Nasional) within the Volksraad, and the Indonesian Political Federation (GAPI) with its demand for an Indonesian Parliament. This research employs a qualitative historical method based on library research (studi pustaka), incorporating the stages of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The findings reveal that the Sutardjo Petition represented the first formal attempt to demand autonomy for Indonesia within the constitutional framework of the Netherlands, though it was ultimately rejected in 1938. The National Fraction served as a significant vehicle for nationalist advocacy within the colonial legislature, championing political equality and the expansion of indigenous rights. GAPI, established in 1939, consolidated various nationalist organizations under the common slogan "Indonesia Berparlemen," representing a peak in pre-war cooperative political mobilization. Collectively, these three movements exemplify a coherent strategy of diplomatic resistance that heightened national political consciousness and laid the groundwork for Indonesia's independence in 1945.

Keywords : *Sutardjo Petition; National Fraction; GAPI; Cooperative Struggle; Indonesian Nationalism*

ABSTRAK

Pergerakan kebangsaan Indonesia pada periode 1927–1942 mengalami transformasi strategi yang signifikan, bergeser dari pendekatan radikal dan nonkooperatif menuju perjuangan politik yang lebih moderat dan kooperatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis tiga bentuk utama perjuangan kooperatif, yaitu Petisi Sutardjo tahun 1936, Fraksi Nasional dalam Volksraad, serta Gabungan Politik Indonesia (GAPI) dengan tuntutan Indonesia Berparlemen. Metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah kualitatif berbasis studi pustaka, yang mencakup tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Petisi Sutardjo merupakan upaya formal pertama untuk menuntut otonomi Indonesia dalam kerangka konstitusional Belanda, meski ditolak pada tahun 1938. Fraksi Nasional menjadi wahana advokasi nasionalis yang penting di dalam parlemen kolonial, memperjuangkan kesetaraan politik dan perluasan hak-hak pribumi. GAPI yang terbentuk pada tahun 1939 berhasil menyatukan berbagai organisasi nasionalis di bawah semboyan "Indonesia Berparlemen," yang mewakili puncak mobilisasi politik kooperatif menjelang pendudukan Jepang. Secara keseluruhan, ketiga gerakan tersebut mencerminkan strategi perlawanan diplomatik yang koheren, yang meningkatkan kesadaran politik nasional dan meletakkan fondasi perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945.

Kata Kunci : *Petisi Sutardjo; Fraksi Nasional; GAPI; Perjuangan Kooperatif; Nasionalisme Indonesia*

PENDAHULUAN

Kolonialisme Belanda di Indonesia tidak hanya meninggalkan jejak eksploitasi ekonomi, tetapi juga menimbulkan respons politik yang semakin terorganisir dari kalangan pribumi. Pergerakan kebangsaan Indonesia, khususnya pada periode 1927 hingga 1942, merupakan babak yang penuh dinamika dalam upaya bangsa Indonesia melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Periode ini ditandai oleh perubahan strategi perjuangan yang sangat berarti: dari semula bersifat radikal dan konfrontatif menuju pendekatan yang lebih moderat, terorganisir, dan kooperatif. Transformasi ini tidak lahir dari kelemahan semangat kebangsaan, melainkan merupakan respons taktis terhadap situasi kolonial yang semakin represif setelah pemerintah Hindia Belanda membubarkan berbagai organisasi nasionalis dan mengasingkan tokoh-tokoh utama pergerakan seperti Soekarno, Mohammad Hatta, dan Sutan Sjahrir ke luar Jawa.

Dalam situasi demikian, ruang gerak perjuangan yang terbuka secara formal menjadi sangat sempit. Namun, keterbatasan ini justru mendorong para tokoh nasionalis untuk memanfaatkan celah-celah yang tersedia dalam sistem kolonial itu sendiri, salah satunya melalui lembaga Volksraad Dewan Rakyat bentukan Belanda yang meski memiliki kewenangan terbatas, tetap dapat dijadikan panggung diplomasi dan advokasi politik. Di sinilah relevansi kajian terhadap tiga bentuk perjuangan kooperatif yang menjadi fokus penelitian ini, yakni Petisi Sutardjo (1936), Fraksi Nasional dalam Volksraad, dan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI yang berdiri pada tahun 1939.

Penelitian ini secara spesifik berupaya menjawab tiga pertanyaan utama: bagaimana latar belakang, isi, dan dampak Petisi Sutardjo terhadap perjuangan kebangsaan; bagaimana peran dan strategi perjuangan Fraksi Nasional sebagai kelompok advokasi di dalam Volksraad; serta bagaimana GAPI terbentuk dan berkontribusi dalam perjuangan menuju Indonesia Berparlemen. Kajian terhadap ketiga entitas sejarah ini memiliki urgensi tersendiri dalam konteks historiografi Indonesia. Pertama, ketiga gerakan ini sering kali dipandang sebelah mata karena tidak berujung pada kemerdekaan langsung. Padahal, analisis yang lebih cermat menunjukkan bahwa mereka membentuk fondasi kesadaran politik kolektif yang pada akhirnya mematangkan bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya pada Agustus 1945. Kedua, kajian ini memberikan perspektif yang lebih seimbang dalam memahami dinamika pergerakan nasional, yakni bahwa perjuangan kooperatif dan nonkooperatif bukan dua kutub yang saling menegasi, melainkan dua sayap dari satu tubuh perjuangan yang sama.

Secara kontekstual, periode 1936–1942 merupakan masa ketika situasi internasional turut memengaruhi lanskap politik di Asia Tenggara. Meningkatnya ancaman fasisme dari Jerman dan Jepang menciptakan tekanan baru terhadap pemerintah kolonial Belanda yang merasa perlu mempertimbangkan kembali hubungannya dengan rakyat jajahan. Situasi ini dimanfaatkan oleh para tokoh nasionalis untuk mengajukan tuntutan-tuntutan politik dengan argumen bahwa kerja sama hanya akan bermakna jika rakyat Indonesia diberikan hak-hak yang nyata. Dalam konteks inilah Petisi Sutardjo, Fraksi Nasional, dan GAPI berperan sebagai aktor sejarah yang tidak

semata-mata bereaksi terhadap tekanan kolonial, tetapi juga secara aktif membentuk arah perkembangan nasionalisme Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka *(library research).* Pemilihan metode ini didasarkan pada sifat objek kajian yang berupa peristiwa historis yang tidak dapat diobservasi secara langsung, sehingga rekonstruksi fakta sejarah harus dilakukan melalui analisis sumber-sumber tertulis yang relevan dan terpercaya.

Proses penelitian dilaksanakan melalui empat tahapan metodologis yang sistematis. Pertama, heuristik, yaitu tahap pengumpulan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan topik kajian. Sumber-sumber yang digunakan meliputi buku-buku teks sejarah pergerakan nasional, artikel jurnal ilmiah, serta skripsi akademik yang membahas secara spesifik mengenai Petisi Sutardjo, Fraksi Nasional, dan GAPI. Di antara sumber utama yang digunakan adalah karya Sartono Kartodirdjo, R. N. Bayu Aji dkk., serta artikel Nazirwan Rohmadi yang secara khusus mengkaji multikulturalisme dalam konteks Fraksi Nasional.

Kedua, kritik sumber, yaitu tahap verifikasi terhadap keaslian dan keandalan sumber yang telah dikumpulkan. Kritik eksternal dilakukan untuk menilai otentisitas dokumen, sedangkan kritik internal ditujukan untuk mengukur kredibilitas isi informasi yang terkandung dalam sumber tersebut. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Ketiga, interpretasi, yaitu proses memaknai fakta-fakta yang telah diverifikasi dalam kerangka analisis sejarah yang lebih luas. Pada tahap ini, fakta-fakta tentang Petisi Sutardjo, Fraksi Nasional, dan GAPI tidak sekadar disajikan secara deskriptif, melainkan dianalisis secara kritis dalam konteks dinamika politik kolonial dan perkembangan nasionalisme Indonesia. Keempat, historiografi, yaitu penulisan hasil penelitian secara sistematis, koheren, dan mengikuti kaidah penulisan sejarah akademik yang berlaku. Artikel ini merupakan produk akhir dari keempat tahapan metodologis tersebut yang diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kajian sejarah pergerakan nasional Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Petisi Sutardjo 1936: Tuntutan Otonomi Melalui Jalur Konstitusional

Petisi Sutardjo lahir dalam konteks politik yang sangat spesifik: suasana represif rezim kolonial Hindia Belanda yang memuncak pada pertengahan 1930-an. Tokoh-tokoh pergerakan yang selama ini menjadi motor perjuangan nasional telah kehilangan ruang gerak akibat penangkapan dan pengasingan secara sistematis. Soekarno dibuang ke Ende (1934) kemudian Bengkulu (1938), Hatta dan Sjahrir diasingkan ke Boven Digoel (1934). Dalam situasi yang secara

paradoks justru membuka peluang bagi strategi alternatif inilah, Sutardjo Kartohadikusumo, seorang anggota Volksraad dari Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) merumuskan sebuah petisi yang kelak menjadi dokumen politik paling berpengaruh pada era kolonial.

Pada 15 Juli 1936, Sutardjo secara resmi mengajukan petisi kepada Volksraad yang isinya memohon kepada Ratu Belanda dan Staten-Generaal agar diselenggarakan musyawarah antara wakil-wakil Belanda dan Indonesia. Musyawarah tersebut dimaksudkan untuk menyusun rencana pemberian otonomi atau pemerintahan sendiri (zelfbestuur) bagi Hindia Belanda, namun tetap dalam batas-batas konstitusi Kerajaan Belanda. Patut ditekankan bahwa petisi ini tidak menuntut kemerdekaan penuh, melainkan status otonom dalam jangka waktu sepuluh tahun ke depan. Pendekatan gradual ini secara langsung mencerminkan watak kooperatif perjuangan Sutardjo yang meyakini bahwa perubahan struktural dapat dicapai melalui negosiasi dan pengakuan hukum, bukan konfrontasi terbuka.

Aspek yang paling menarik dari Petisi Sutardjo adalah dukungan lintas kelompok yang berhasil dihimpunnya. Petisi ini didukung oleh tokoh-tokoh dari latar belakang yang beragam, antara lain I.J. Kasimo dari kalangan Katolik, Ng. Singgih dari tokoh Jawa, dan Ko Kwat Tiong yang mewakili komunitas Tionghoa. Komposisi dukungan ini mengindikasikan bahwa aspirasi terhadap otonomi Indonesia bukanlah wacana eksklusif kalangan nasionalis Melayu-Muslim, melainkan telah menjadi harapan kolektif berbagai elemen masyarakat yang hidup di bawah sistem kolonial. Dukungan multietnis ini juga menunjukkan meluasnya kesadaran kebangsaan yang melampaui batas-batas identitas etnis dan agama.

Hasil pemungutan suara di Volksraad pada September 1936 memberikan kemenangan bagi petisi ini dengan rasio 26 berbanding 20. Namun demikian, kemenangan di tingkat parlemen kolonial tidak berlanjut ke tingkat pengambilan keputusan yang lebih tinggi. Pemerintah Belanda di Den Haag, setelah menggantung respons selama lebih dari dua tahun, akhirnya menolak petisi tersebut pada 16 November 1938. Penolakan didasarkan pada tiga argumen utama: Indonesia dinilai belum matang secara politik, rumusan otonomi dalam petisi dianggap tidak konkret, dan tuntutan tersebut dipandang terlalu dini dalam konteks hubungan kolonial yang sedang berlangsung.

Penolakan ini memiliki signifikansi ganda dalam narasi pergerakan nasional. Di satu sisi, ia menegaskan watak dasar kolonialisme Belanda yang tidak pernah secara tulus berniat memberikan ruang politik yang lebih besar bagi rakyat Indonesia. Di sisi lain, penolakan tersebut justru memperkuat argumen kelompok nonkooperatif yang sejak awal skeptis terhadap jalur kooperatif. Meskipun demikian, Petisi Sutardjo tetap meninggalkan warisan sejarah yang tidak ternilai: ia membuktikan bahwa kaum terdidik Indonesia mampu merumuskan tuntutan ketatanegaraan yang sistematis dan mengangkat isu status konstitusional Indonesia ke permukaan diskursus politik internasional. Lebih dari itu, petisi ini menjadi preseden penting yang menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia secara sadar dan terorganisir menginginkan pengakuan atas hak-hak politiknya (Kartodirdjo, 1993).

2. Fraksi Nasional dalam Volksraad: Advokasi Konstitusional dari Dalam Sistem

Fraksi Nasional merupakan kelompok anggota Volksraad yang berhimpun atas dasar kesamaan orientasi nasionalis dan komitmen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia melalui jalur konstitusional. Kemunculannya tidak dapat dilepaskan dari strategi perjuangan kooperatif yang berkembang sebagai respons terhadap tekanan kolonial yang semakin intensif. Di dalam sistem Volksraad yang sejatinya dirancang untuk mengamankan kepentingan pemerintah kolonial, Fraksi Nasional hadir sebagai suara alternatif yang secara konsisten menantang kebijakan-kebijakan diskriminatif dan memperjuangkan kesetaraan hak bagi warga pribumi (Rohmadi, 2017, hlm. 64).

Tokoh sentral dalam Fraksi Nasional adalah Mohammad Husni Thamrin, seorang politisi Betawi yang dikenal keras suaranya dalam membela kepentingan rakyat Indonesia. Thamrin bukan sekadar anggota dewan yang mengisi kursi; ia adalah seorang orator ulung dan advokat politik yang berani. Dalam berbagai sidang Volksraad, Thamrin secara terang-terangan mengkritik kebijakan kolonial yang dianggap merugikan rakyat, mulai dari sistem pajak yang tidak adil hingga diskriminasi dalam akses terhadap pendidikan dan jabatan publik. Keberanian Thamrin berbicara di forum resmi kolonial menjadikannya salah satu simbol perjuangan yang paling berpengaruh dalam periode ini.

Secara strategis, Fraksi Nasional mengandalkan tiga pendekatan utama dalam perjuangannya. Pertama, debat dan argumentasi memanfaatkan forum resmi Volksraad untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan kolonial yang diskriminatif dan mendesak reformasi yang lebih adil. Kedua, advokasi hak-hak dasar secara konsisten memperjuangkan persamaan hak politik, ekonomi, dan sosial antara warga pribumi dan warga Eropa. Ketiga, penggalangan solidaritas nasional menggunakan posisi mereka di Volksraad sebagai corong untuk menyebarluaskan semangat kebangsaan di kalangan rakyat yang lebih luas (Bayu Aji, Sumarno, & Hermawan, 2020, hlm. 115).

Penting untuk memahami Fraksi Nasional dalam konteks pergeseran besar yang tengah berlangsung dalam pergerakan nasional Indonesia. Periode 1927–1942 ditandai oleh suatu paradoks: semakin besarnya tekanan kolonial justru mendorong kristalisasi identitas nasional yang lebih kuat. Organisasi-organisasi yang sebelumnya berjuang secara sektoral dan kedaerahan mulai menyadari pentingnya persatuan dan koordinasi. Dalam dinamika ini, Fraksi Nasional menjadi semacam laboratorium politik di mana para nasionalis belajar menggunakan instrumen formal untuk tujuan emansipasi. Praktik debat, penyusunan mosi, dan advokasi kebijakan yang mereka jalani di Volksraad sesungguhnya membangun sebuah tradisi politik modern yang kelak akan menjadi fondasi sistem demokrasi Indonesia pasca-kemerdekaan (Rohmadi, 2017, hlm. 64).

Tentu saja, pendekatan kooperatif ini tidak lepas dari kritik. Sebagian tokoh nasionalis memandang partisipasi dalam Volksraad sebagai bentuk legitimasi terhadap sistem kolonial yang pada dasarnya cacat. Namun demikian, posisi Fraksi Nasional dapat dipahami bukan sebagai penerimaan pasif terhadap kolonialisme, melainkan sebagai strategi taktis untuk tetap menjaga keberlangsungan perjuangan nasional dalam kondisi yang sangat membatasi. Kontribusi mereka

dalam membangun kesadaran politik, memperluas ruang partisipasi, dan mendokumentasikan aspirasi rakyat Indonesia melalui saluran resmi merupakan bagian penting dari mozaik perjuangan kebangsaan yang tidak dapat diabaikan (Djunedding, t.t., hlm. 47).

3. GAPI dan Tuntutan Indonesia Berparlemen: Puncak Perjuangan Kooperatif

Jika Petisi Sutardjo merupakan inisiatif individual yang bersifat formal-institusional, dan Fraksi Nasional merupakan perjuangan kelompok dalam bingkai parlemen kolonial, maka Gabungan Politik Indonesia (GAPI) merepresentasikan tahapan paling matang dari strategi perjuangan kooperatif sebelum Perang Dunia II. GAPI berdiri pada tahun 1939 atas prakarsa Mohammad Husni Thamrin yang saat itu menjabat sebagai Ketua Departemen Politik Parindra. Pembentukan GAPI mencerminkan kesadaran kolektif para tokoh nasionalis bahwa perjuangan yang terfragmentasi dalam berbagai organisasi yang terpisah tidak akan mampu menghadirkan tekanan yang cukup kuat terhadap pemerintah kolonial.

Dalam anggaran dasarnya, GAPI berdiri di atas tiga landasan prinsipial: hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Indonesia, persatuan nasional seluruh rakyat Indonesia berdasarkan nilai-nilai kerakyatan dalam dimensi politik, ekonomi, dan sosial, serta persatuan aksi seluruh gerakan Indonesia. Kepemimpinan kolektif GAPI dipegang oleh tiga tokoh dari tiga organisasi yang berbeda: Muhammad Husni Thamrin dari Parindra, Amir Syarifuddin dari Gerindo, dan Abikoesno Tjokrosoejoso dari PSII. Komposisi kepemimpinan yang lintas organisasi dan lintas ideologi ini sendiri sudah merupakan pencapaian yang luar biasa dalam konteks pergerakan nasional yang sebelumnya sering terpecah oleh perbedaan pandangan. (Hariyanto, 2018, hlm. 25)

Pada konferensi pertamanya yang diadakan 4 Juli 1939, GAPI menegaskan semboyan perjuangan yang segera menjadi tuntutan paling resonan dalam sejarah pergerakan: "Indonesia Berparlemen." Tuntutan ini mengandung makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar perubahan institusional. Ia merupakan tuntutan atas kedaulatan rakyat—hak bangsa Indonesia untuk memiliki parlemen yang dipilih dari dan oleh rakyat, dengan pemerintah yang bertanggung jawab kepada parlemen tersebut. Dalam konteks ketika Eropa sedang menghadapi ancaman fasisme Nazi Jerman, GAPI dengan cerdas menempatkan tuntutannya dalam bingkai yang relevan dengan situasi global: kerja sama antara Belanda dan Indonesia hanya akan bermakna apabila Indonesia diberikan hak-hak nyata dalam urusan pemerintahan.

Manifest GAPI yang dikeluarkan pada September 1939 secara eksplisit mengajak rakyat Indonesia dan rakyat Belanda untuk bersama-sama menghadapi ancaman fasisme, dengan syarat bahwa Indonesia diberikan hak-hak baru dalam pemerintahan berupa parlemen yang representatif. Seruan ini disambut antusias oleh pers Indonesia, dan GAPI berhasil mengorganisir gelombang rapat umum yang mencapai puncaknya pada 12 Desember 1939 ketika lebih dari seratus titik di seluruh Indonesia secara serentak mengadakan rapat untuk mempropagandakan tujuan GAPI. Puncak mobilisasi ini merupakan demonstrasi kekuatan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah pergerakan nasional.

Selanjutnya, GAPI mendirikan Kongres Rakyat Indonesia (KRI) yang diresmikan pada 25 Desember 1939 di Jakarta. Kongres ini menghasilkan beberapa keputusan bersejarah, antara lain

penetapan Bendera Merah Putih dan lagu Indonesia Raya sebagai simbol persatuan, serta penguatan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Keputusan-keputusan ini mempertegas bahwa GAPI tidak hanya berjuang dalam tataran politik formal, tetapi juga aktif dalam membangun identitas nasional yang konkret dan bermuatan budaya.

Namun, seperti halnya Petisi Sutardjo dan Fraksi Nasional, perjuangan GAPI juga menghadapi tembok kebuntuan. Situasi internasional yang semakin genting akibat Perang Dunia II justru membuat pemerintah kolonial Belanda semakin represif, bukan semakin terbuka. Peraturan inheemse militie dikeluarkan dan izin rapat diperketat. GAPI akhirnya dibubarkan pada tahun 1942 menyusul invasi Kekaisaran Jepang ke wilayah Hindia Belanda. Meskipun berakhir tanpa pencapaian tuntutan utamanya, GAPI meninggalkan warisan yang sangat berharga: pengalaman berorganisasi lintas partai, tradisi mobilisasi massa yang teratur, dan semangat persatuan nasional yang akan terus hidup hingga proklamasi kemerdekaan (Yolanda & Hartati, 2021, hlm. 14–15).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Petisi Sutardjo, Fraksi Nasional, dan GAPI merupakan tiga pilar strategi perjuangan kooperatif yang saling melengkapi dalam pergerakan kebangsaan Indonesia periode 1936–1942. Ketiga gerakan ini tidak berdiri secara terpisah, melainkan membentuk rangkaian perjuangan diplomatik yang koheren: dari tuntutan otonomi melalui petisi formal, advokasi konstitusional di dalam Volksraad, hingga mobilisasi massa yang terorganisir di bawah panji Indonesia Berparlemen.

Meskipun tidak satu pun dari ketiga gerakan ini berhasil mencapai tujuan imediatnya—Petisi Sutardjo ditolak, Fraksi Nasional menghadapi keterbatasan struktural parlemen kolonial, dan GAPI dibubarkan akibat invasi Jepang kontribusi mereka terhadap perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan tidak dapat diremehkan. Secara kumulatif, mereka berhasil membangun kesadaran politik yang tinggi di kalangan rakyat, mengkonsolidasikan gerakan nasional yang sebelumnya terfragmentasi, serta meletakkan fondasi pemikiran ketatanegaraan yang menjadi acuan pasca-kemerdekaan.

Yang paling krusial adalah pelajaran sejarah yang dapat dipetik dari periode ini: bahwa nasionalisme tidak semata-mata tumbuh dari konfrontasi bersenjata, melainkan juga dari kecerdasan diplomasi, keberanian berbicara di forum resmi, dan kemampuan membangun koalisi melampaui batas-batas primordial. Dalam konteks pendidikan sejarah, pemahaman yang komprehensif terhadap strategi perjuangan kooperatif ini penting untuk memberikan gambaran yang lebih utuh dan berimbang tentang kompleksitas pergerakan nasional Indonesia sebuah kompleksitas yang mencerminkan kedewasaan dan kedalaman bangsa dalam memperjuangkan hak-hak fundamentalnya.

DAFTAR PUSTAKA

Bayu Aji, R. N., Sumarno, dan Eko Satriya Hermawan. (2020). Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia 1900–1945: Dalam Perspektif Penguatan Nasion dan Nasionalisme. Surabaya: Unesa University Press.

Djunedding, Burhaman. (t.t.). Perjuangan Tanpa Revolusi: Perspektif Baru dalam Memahami Kekerasan Periode Revolusi di Indonesia Timur 1945–1950. Makassar: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pejuang Republik Indonesia.

Hariyanto. (2018). Peranan Gabungan Politik Indonesia (GAPI) dalam Pergerakan Nasional Indonesia (Skripsi). Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember.

Kartodirdjo, Sartono. (1993). Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme, Jilid 2. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Putri, Maretha Yolinda. (2021). Perkembangan Gabungan Politik Indonesia (GAPI) pada Masa Pergerakan Nasional Indonesia Tahun 1939–1942 (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Metro.

Rohmadi, Nazirwan. (2017). "Fraksi Nasional: Multikulturalisme untuk Indonesia Merdeka yang Terpinggirkan dalam Pembelajaran Sejarah." Prosiding Seminar Nasional Program Studi Pendidikan Sejarah se-Indonesia: Kajian Muatan dan Posisi Mata Pelajaran Sejarah di Kurikulum 2013, Vol. 1, No. 1, hlm. 64.

Yolanda, Maretha, dan Umi Hartati. (2021). "Perkembangan Gabungan Politik Indonesia (GAPI) pada Masa Pergerakan Nasional Indonesia 1939–1942." Swarnadwipa: Jurnal Kajian Sejarah, Sosial, Budaya, dan Pembelajarannya, Vol. 5, No. 1, hlm. 10–20.